

OPTIMALISASI REKAPITULASI DATA TENAGA KERJA ASING PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Gandhes Ayu Tarisa Agdysta¹, Radjikan²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

gandhesayutarisa@gmail.com, radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital dalam pengelolaan data ketenagakerjaan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan sistem rekapitulasi digital dalam pengelolaan data tenaga kerja asing pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kegiatan dilaksanakan selama 40 hari kerja, menggunakan metode partisipatif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan praktik langsung. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara tidak terstruktur, studi dokumentasi, serta praktik langsung digitalisasi dokumen dan penyusunan rekapitulasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif berdasarkan daerah penempatan, jenis pekerjaan, dan periode izin kerja. Kegiatan berhasil mendigitalisasi lebih dari 500 surat masuk dan menginput data lebih dari 200 TKA yang bekerja di berbagai perusahaan di Jawa Timur. Rekapitulasi menunjukkan konsentrasi TKA tertinggi di Kabupaten Pasuruan, dengan dominasi kewarganegaraan Tiongkok pada sektor manufaktur. Sistem digital berhasil meningkatkan efisiensi pencarian data dan memperkuat fungsi pengawasan kepatuhan perusahaan. Optimalisasi rekapitulasi digital telah mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan sesuai konsep *good governance*. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi sistem dengan platform nasional untuk keberlanjutan transformasi digital.

Kata kunci : Rekapitulasi data, tenaga kerja asing, transformasi digital

ABSTRACT

Digital transformation in employment data management is an urgent necessity to improve the quality of public services. This community service activity aims to optimize the digital recapitulation system in the management of foreign worker data at the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office. The activity was carried out over 40 working days, using a qualitative participatory method with a field study and hands-on approach. Data collection techniques included participant observation, unstructured interviews, documentation studies, as well as hands-on document digitization and recapitulation compilation. Data analysis was conducted using descriptive quantitative methods based on placement area, job type, and work permit period. The activity successfully digitized more than 500 incoming letters and inputted data on more than 200 foreign workers employed by various companies in East Java. The recapitulation showed the highest of foreign workers in Pasuruan Regency. The digital system has successfully increased data search efficiency and strengthened the function of monitoring company compliance. The optimization of digital recapitulation has supported the principles of transparency, accountability, and effectiveness in governance in accordance with the concept of good governance. It's necessary to increase human resource capacity and integrate the system with the national platform for the sustainability of digital transformation.

Keywords : Data recapitulation, foreign workers, digital transformation

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan telah menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di era modern. Penerapan digital menjadi gambaran yang menyeluruh dan analitis tentang bagaimana digitalisasi dalam pengelolaan administrasi dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta mendorong terciptanya birokrasi yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap perkembangan zaman (Pratiwi et al., 2025). Di era Revolusi Industri 4.0, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan

birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel. Negara maju seperti Estonia telah membuktikan bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan sekaligus mengurangi beban birokrasi yang berbelit-belit (Yudan, 2019).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi publik sebagaimana diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018). Dalam konteks pelayanan ketenagakerjaan, digitalisasi menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas data dan volume transaksi administrasi yang terus meningkat seiring dengan dinamika pasar kerja yang semakin terbuka. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, total tenaga kerja asing di Indonesia per September mencapai 133.979 orang, naik signifikan dibandingkan tahun 2023 dengan total 73.011 orang, yang berarti terjadi peningkatan sekitar 83,4% (Kusumastuti, 2024).

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan terbesar di Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam pengelolaan data ketenagakerjaan, khususnya terkait tenaga kerja asing (TKA). Berdasarkan data dari Open Data Jatim (2025), angka tenaga kerja asing di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 mencapai 1.150 dari berbagai sektor usaha. Besarnya volume data TKA ini menimbulkan permasalahan dalam hal pencatatan, verifikasi, dan pelaporan yang masih mengandalkan sistem manual atau semi-digital. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data, duplikasi informasi, serta keterlambatan dalam proses pengawasan dan pelaporan kepada pemerintah pusat. Padahal, keakuratan data TKA sangat penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan, melindungi hak-hak pekerja lokal, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip harus dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, 2009). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data ketenagakerjaan, termasuk melalui digitalisasi dokumen. Namun demikian, proses digitalisasi yang berjalan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional. Proses *scanning* dokumen fisik menjadi format digital masih dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sistem *basis data* yang ada juga belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga proses verifikasi dan rekapitulasi data dari berbagai perusahaan masih harus dilakukan secara bertahap dengan koordinasi yang intensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi sistem rekapitulasi digital masih sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data TKA di Provinsi Jawa Timur.

Permasalahan pengelolaan data ketenagakerjaan yang masih konvensional sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sistem administrasi manual cenderung tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan (Khoiriah, 2023). Sistem manual memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses input data, pencarian informasi, serta penyusunan laporan, sehingga menghambat kecepatan pelayanan publik. Selain itu, ketergantungan pada dokumen fisik juga menimbulkan risiko kehilangan atau kerusakan data yang dapat berdampak pada akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pelayanan ketenagakerjaan, keterlambatan dan ketidakakuratan data dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi pekerja, perusahaan, maupun pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan.

Pentingnya optimalisasi rekapitulasi digital dalam pengelolaan data ketenagakerjaan juga dikuatkan oleh teori *e-government* yang dikemukakan oleh Indrajit dalam (Ma'ruf, 2016), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan proses, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan transparansi. Selain itu, penerapan sistem digital juga sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dwiyanto, 2021). Dalam konteks pelayanan ketenagakerjaan, penerapan sistem rekapitulasi digital yang optimal diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi dan pelaporan data TKA, meningkatkan akurasi informasi, serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja asing.

Program pengabdian yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung permasalahan pengelolaan data ketenagakerjaan serta berkontribusi dalam upaya optimalisasi sistem rekapitulasi digital. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan input data, scanning dokumen, verifikasi informasi, dan rekapitulasi data TKA, mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses digitalisasi serta memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan sistem. Pengalaman praktis ini tidak hanya memberikan pembelajaran berharga bagi mahasiswa tentang implementasi teori administrasi publik dalam praktik nyata, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem rekapitulasi digital dalam pengelolaan data tenaga kerja asing pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam proses rekapitulasi digital data TKA yang sedang berjalan; (2) membantu proses digitalisasi dokumen dan input data TKA secara akurat dan sistematis; (3) menyusun rekapitulasi data TKA berdasarkan daerah penempatan untuk mendukung fungsi pengawasan dan pelaporan; serta (4) memberikan rekomendasi perbaikan sistem rekapitulasi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data ketenagakerjaan di masa mendatang. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintahan dalam mendukung transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan jenis pengabdian berbasis partisipasi langsung dalam bentuk pendampingan dan asistensi teknis pada instansi pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal Nomor 124-126, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan berlangsung selama 40 hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Juli 2025 hingga 05 September 2025 dengan waktu kerja efektif setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Sasaran dalam kegiatan ini adalah aparatur sipil negara di lingkungan Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, khususnya pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Populasi data dalam kegiatan ini mencakup seluruh dokumen perizinan dan pelaporan Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur pada periode Juli-Agustus 2025 dengan jumlah mencapai puluhan dokumen dari berbagai perusahaan-perusahaan di Jawa Timur. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling, di mana seluruh dokumen dan data yang masuk

pada periode pelaksanaan kegiatan dijadikan objek digitalisasi dan rekapitulasi tanpa pengecualian untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan basis data yang dibangun.

Metode pengabdian yang digunakan adalah metode partisipatif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan praktik langsung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat cara, yaitu: observasi partisipan untuk mengamati langsung proses kerja dan sistem yang berjalan di instansi; wawancara tidak terstruktur dengan pembimbing lapangan dan pegawai terkait untuk memahami kendala dan kebutuhan sistem; studi dokumentasi dengan menelaah arsip fisik dan digital yang tersedia; serta praktik langsung dalam kegiatan digitalisasi dokumen, input data, verifikasi informasi, dan penyusunan rekapitulasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung jumlah dan sebaran Tenaga Kerja Asing berdasarkan daerah penempatan, jenis pekerjaan, dan periode izin kerja. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel rekapitulasi yang menggambarkan kondisi aktual pengelolaan data Tenaga Kerja Asing di Provinsi Jawa Timur. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: tahap persiapan dengan mengajukan izin dan koordinasi awal; tahap pelaksanaan yang mencakup orientasi untuk memahami sistem kerja dan struktur organisasi, digitalisasi dokumen, input dan verifikasi data, penyusunan rekapitulasi, dan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dan keberhasilan kegiatan; serta tahap penyusunan laporan dan rekomendasi perbaikan sistem yang dapat diimplementasikan oleh instansi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data data mendatang.

HASIL dan PEMBAHASAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Instansi ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari satu sekretariat, empat bidang utama, dan sembilan belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai unit kerja tempat pelaksanaan kegiatan memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan data ketenagakerjaan, termasuk data Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan observasi awal, sistem pengelolaan data di bidang ini masih menggunakan kombinasi antara sistem manual dan semi-digital, di mana dokumen fisik masih menjadi rujukan utama sebelum dilakukan digitalisasi dan input ke dalam sistem basis data elektronik.

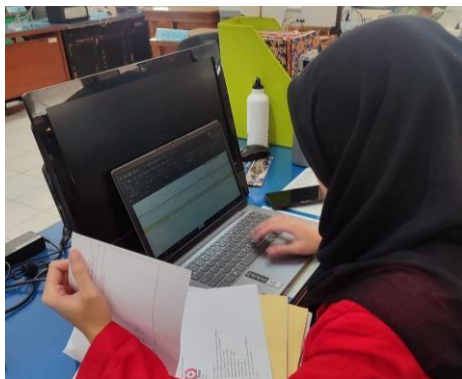
Karakteristik data Tenaga Kerja Asing yang menjadi objek kegiatan pengabdian menunjukkan volume yang cukup besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Pada periode Juli-Agustus 2025, tercatat puluhan dokumen perizinan TKA dari berbagai perusahaan yang beroperasi di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Keberagaman sektor usaha yang mempekerjakan TKA mencakup industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, konstruksi, serta teknologi informasi. Kewarganegaraan TKA yang tercatat juga sangat beragam, dengan dominasi dari negara-negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, dan Filipina. Kompleksitas data ini menuntut sistem pencatatan yang terstruktur, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung fungsi pengawasan dan pelaporan kepada pemerintah pusat.

Kegiatan pengabdian diawali dengan tahap orientasi dan adaptasi terhadap sistem kerja yang berlangsung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Pada tahap ini, pelaksana kegiatan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai alur kerja pengelolaan data TKA, mulai dari penerimaan dokumen perizinan dari perusahaan, verifikasi kelengkapan dokumen, input data ke dalam sistem, hingga penyusunan laporan rekapitulasi. Sistem yang digunakan saat ini adalah aplikasi basis data berbasis desktop yang dikembangkan secara internal oleh instansi, namun belum terintegrasi secara penuh dengan sistem pelaporan nasional. Proses input data masih dilakukan secara manual dengan mengetik ulang informasi dari dokumen fisik

ke dalam sistem elektronik, yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan akibat faktor human error.

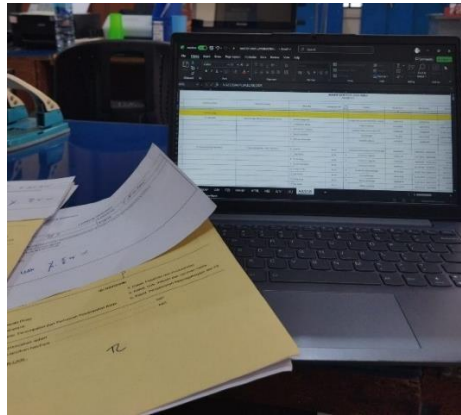
Tahap pelaksanaan kegiatan difokuskan pada tiga aktivitas utama, yaitu digitalisasi dokumen, input dan verifikasi data, serta penyusunan rekapitulasi. Proses digitalisasi dokumen dilakukan dengan menggunakan *scanner* untuk mengubah dokumen fisik menjadi format PDF yang kemudian disimpan dalam folder terstruktur berdasarkan nama perusahaan dan periode perizinan. Selama kegiatan berlangsung, berhasil dilakukan *scanning* terhadap lebih dari 500 surat masuk, termasuk dokumen perizinan TKA yang mencakup surat permohonan, paspor, kontrak kerja, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dan dokumen pendukung lainnya. Proses ini memberikan manfaat signifikan dalam hal kemudahan akses informasi, mengingat dokumen digital dapat dicari dan diakses dengan lebih cepat dibandingkan dengan mencari dokumen fisik dalam tumpukan arsip yang berjumlah ratusan berkas.

Kegiatan input dan verifikasi data dilaksanakan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi untuk memastikan keakuratan informasi yang tercatat dalam sistem. Setiap data yang diinput harus melalui proses verifikasi silang dengan dokumen fisik untuk memastikan kesesuaian informasi seperti nama lengkap TKA, nomor paspor, kewarganegaraan, jabatan, nama perusahaan, alamat penempatan, dan masa berlaku izin kerja. Dalam proses ini ditemukan berbagai kendala teknis seperti perbedaan format penulisan nama antara dokumen paspor dan kontrak kerja, serta ketidaklengkapan informasi pada beberapa dokumen. Kendala-kendala tersebut diatasi melalui komunikasi dengan pihak perusahaan untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan data. Selama periode kegiatan, berhasil dilakukan input data terhadap lebih dari 200 TKA yang bekerja di berbagai perusahaan di Jawa Timur.



Gambar 2 Menginput data tenaga kerja asing bulan Agustus 2025

Penyusunan rekapitulasi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi TKA berdasarkan daerah penempatan (kabupaten/kota). Rekapitulasi berdasarkan daerah penempatan menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan menempati posisi tertinggi dengan jumlah TKA terbanyak, diikuti oleh Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Konsentrasi TKA di wilayah-wilayah tersebut berkorelasi dengan keberadaan kawasan industri yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Rekapitulasi berdasarkan kewarganegaraan menunjukkan dominasi TKA dari Tiongkok yang mencapai hampir 40% dari total TKA, diikuti oleh Jepang, Korea Selatan, dan India. Rekapitulasi berdasarkan sektor usaha menunjukkan bahwa sektor manufaktur menyerap TKA terbanyak, khususnya untuk posisi manajerial dan teknis yang membutuhkan keahlian khusus yang belum tersedia di pasar tenaga kerja lokal.



Gambar 3 Rekapitulasi data tenaga kerja asing bulan Agustus 2025

Selain kegiatan inti digitalisasi dan rekapitulasi data, pelaksana kegiatan juga terlibat dalam berbagai aktivitas pendukung yang memberikan pemahaman lebih luas tentang dinamika ketenagakerjaan di Jawa Timur. Partisipasi dalam kegiatan pelatihan bimbingan manajemen bagi wirausaha mandiri yang merupakan kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia memberikan wawasan tentang pentingnya kemitraan *multi-stakeholder* dalam pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan yang diikuti oleh 50 peserta dari 12 kabupaten/kota di Jawa Timur ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi wirausaha lokal agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Keterlibatan dalam forum konsultasi publik layanan perizinan penggunaan tenaga kerja asing juga memberikan perspektif tentang pentingnya transparansi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



Gambar 4 Kegiatan bimbingan manajemen bagi wirausaha mandiri



Gambar 5 Forum konsultasi publik layanan perizinan penggunaan tenaga kerja asing

Kegiatan *job canvassing* atau survei lapangan kebutuhan tenaga kerja memberikan pengalaman berharga dalam memahami dinamika permintaan tenaga kerja di lapangan. Melalui kunjungan langsung ke beberapa perusahaan di wilayah Surabaya, pelaksana kegiatan dapat memahami bahwa pentingnya pembaruan dan verifikasi lowongan kerja melalui komunikasi langsung dengan HRD untuk memahami spesifikasi/kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dan benefit yang ditawarkan. Banyak perusahaan multinasional yang membawa TKA untuk posisi-posisi strategis seperti manajer teknis, *quality control specialist*, dan *research and development staff* yang memiliki keahlian spesifik sesuai dengan standar teknologi yang digunakan oleh perusahaan induk di luar negeri. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan TKA dapat memberikan dampak positif dalam hal transfer teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui mekanisme *on-the-job training*.



Gambar 6 Kegiatan survei lapangan kebutuhan tenaga kerja

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa implementasi sistem rekapitulasi digital memberikan peningkatan signifikan dalam efisiensi pengelolaan data Tenaga Kerja Asing dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Waktu yang diperlukan untuk mencari informasi spesifik tentang seorang TKA atau perusahaan tertentu dapat dipangkas dari rata-rata 15-20 menit menjadi hanya 3-5 menit dengan menggunakan fungsi pencarian di sistem basis data digital. Kemudahan akses ini sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada perusahaan yang membutuhkan informasi atau verifikasi status perizinan TKA secara cepat.

Temuan ini sejalan dengan konsep *e-government* yang dikemukakan oleh Indrajit dalam (Ma'ruf, 2016), yang menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi pelayanan publik. Dalam konteks pengelolaan data ketenagakerjaan, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan berbasis data. Sistem digital memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan analisis tren ketenagakerjaan secara komprehensif, seperti mengidentifikasi sektor-sektor yang paling banyak menyerap TKA, memantau tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan, serta mendeteksi potensi pelanggaran perizinan secara lebih dini.

Namun demikian, kegiatan ini juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan dalam sistem rekapitulasi digital yang saat ini digunakan. Sistem basis data yang ada belum terintegrasi secara penuh dengan sistem pelaporan nasional yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga masih diperlukan proses transfer data secara manual untuk keperluan pelaporan ke tingkat pusat. Hal ini menimbulkan potensi duplikasi kerja dan inkonsistensi data antara tingkat provinsi dan pusat. Selain itu, sistem yang digunakan juga belum memiliki fitur backup otomatis dan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data dari risiko kehilangan atau kebocoran informasi.

Kendala lain yang ditemukan adalah ketergantungan sistem pada kemampuan individu dalam pengoperasian teknologi. Beberapa pegawai, terutama yang telah lama bekerja dengan sistem manual, mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem digital. Hal ini mengakibatkan proses input data menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pegawai tentang penggunaan sistem digital dan manajemen data. Reformasi birokrasi menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam pemerintahan sangat bergantung pada komitmen organisasi dalam membangun kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan (Dwiyanto, 2021). Tanpa adanya penguatan kapasitas SDM, investasi teknologi yang besar tidak akan memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan pengabdian ini memberikan implikasi penting terhadap upaya peningkatan tata kelola ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur. Ketersediaan data TKA yang akurat dan terbaru memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan fungsi pengawasan secara lebih efektif.

Dengan sistem digital, petugas pengawas ketenagakerjaan dapat dengan mudah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang telah melewati masa berlaku izin kerja TKA mereka, sehingga dapat dilakukan tindakan pembinaan atau penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi data juga memungkinkan masyarakat dan organisasi serikat pekerja untuk mengawasi kepatuhan perusahaan dalam melindungi hak-hak pekerja lokal, terutama terkait dengan rasio penggunaan TKA yang diwajibkan untuk disertai dengan program alih pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

Dari perspektif *good governance*, sistem rekapitulasi digital yang efektif sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut konsep *good governance* yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)*, tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh sistem informasi yang memadai untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Rohman, 2024). Dalam konteks ketenagakerjaan, keputusan strategis seperti penetapan kebijakan pelatihan kerja, pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal, dan penyusunan rencana tenaga kerja daerah memerlukan data empiris yang valid dan terkini. Sistem rekapitulasi digital yang optimal dapat menyediakan data tersebut sebagai dasar perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengalaman kegiatan pengabdian ini juga memberikan pembelajaran penting tentang pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintahan dalam mendukung transformasi digital sektor publik. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan digitalisasi dan rekapitulasi data tidak hanya memberikan manfaat bagi instansi dalam hal penambahan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan waktu intensif, tetapi juga memberikan pengalaman belajar praktis bagi mahasiswa tentang kompleksitas administrasi pemerintahan di era digital. Dalam konteks transformasi digital, perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan sistem, menyediakan tenaga ahli, dan melakukan riset untuk perbaikan berkelanjutan.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya digitalisasi, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengoptimalkan sistem rekapitulasi digital agar dapat memberikan dampak maksimal terhadap kualitas pelayanan ketenagakerjaan. Pengembangan sistem yang terintegrasi dengan platform nasional, penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta penyusunan standar operasional prosedur yang jelas merupakan agenda prioritas yang perlu segera dilaksanakan. Dengan demikian, transformasi digital dalam pengelolaan data ketenagakerjaan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang terus didorong oleh pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur selama 40 hari kerja telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu mengoptimalkan sistem rekapitulasi digital dalam pengelolaan data TKA melalui serangkaian kegiatan digitalisasi dokumen, input dan verifikasi data, serta penyusunan rekapitulasi berdasarkan daerah penempatan. Kegiatan ini berhasil melakukan digitalisasi terhadap lebih dari 500 surat masuk, meliputi dokumen perizinan atau dokumen TKA dan menginput data lebih dari 300 tenaga kerja asing yang bekerja di berbagai perusahaan di Jawa Timur, dengan rekapitulasi menunjukkan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Meskipun demikian, ditemukan beberapa keterbatasan dalam sistem yang ada, antara lain ketergantungan pada kemampuan individu dalam pengoperasian

teknologi, serta belum adanya fitur *backup* otomatis. Dari perspektif *good governance*, sistem rekapitulasi digital yang efektif telah mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam penggunaan TKA sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil kegiatan, terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas sistem rekapitulasi digital di masa mendatang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur perlu penguatan infrastruktur teknologi informasi melalui pengadaan server dengan kapasitas yang memadai, sistem *backup* otomatis, dan protokol keamanan data menjadi prioritas yang harus segera dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan sistem. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan berkelanjutan tentang pengoperasian sistem digital, manajemen basis data, dan analisis data perlu dilakukan secara terstruktur untuk seluruh pegawai agar dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan ketenagakerjaan. Pengembangan portal *online* yang memungkinkan perusahaan untuk melaporkan data TKA secara *real-time* dapat menjadi inovasi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pelaporan sekaligus mengurangi beban administratif di tingkat dinas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM PRESS.
- Khoiriah, U. (2023). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi*.
- Kusumastuti, H. (2024). *Data Tenaga Kerja Asing di Indonesia 2024, Inilah 10 Negara yang Warganya Bekerja di Indonesia*. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/data-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-2024-inilah-10-negara-yang-warganya-bekerja-di-indonesia-EkoiN>
- Ma'ruf, J. (2016). ELECTRONIC GOVERNMENT PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN POTENSI KELURAHAN (Studi Kasus : Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Pringsewu). *PROCIDING KMSI*, 4(1). <https://jurnal.ftikomibn.ac.id/index.php/kmsi/article/view/168>
- Open Data Jatim. (2025). *Jumlah Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Sektor Usaha*. Open Data Provinsi Jawa Timur. <https://opendata.jatimprov.go.id/dataset/jumlah-tenaga-kerja-asing-berdasarkan-sektor-usaha>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- Pratiwi, S. F., Zalukhu, L. A., Tesa, A. R., Aisyah, I. S., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Implementasi Digital pada Tata Kelola Administrasi: Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan di Era Birokrasi. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15521459>
- Rohman, N. (2024). *Membangun Good Governance: Konsep, Prinsip, dan Implementasinya*. Wirabuana.Ac.Id. <https://wirabuana.ac.id/artikel/membangun-good-governance-2/>